



RENCANA KERJA

T A H U N 2 0 2 5

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BEKASI**

Lantai 5 Gedung D
Jl. A. Yani No. 1
Komplek Wali Kota Bekasi



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Penyusunannya, Rencana Kerja (Renja) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Normenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini mengacu pada kerangka arahan yang telah ditetapkan dalam rancangan awal RKPD Tahun 2025 Kota Bekasi dan merupakan tahap awal dari rangkaian penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang kemudian akan dibahas bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi dan Perangkat Daerah lain dalam kegiatan Penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun 2025. Renja Kerja (Renja) Tahun 2025 memuat hasil evaluasi tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran serta rencana kerja dan pendanaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam penyusunan RENJA Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam perumusan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 guna pencapaian target-target kinerja sasaran pembangunan sebagaimana dalam rancangan RKPD Tahun 2025.

Bekasi, Juni 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

drh. SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI, M.M

NIP. 19710608 199803 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DPPPA KOTA BEKASI	
TAHUN LALU.....	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi	
Tahun 2024 dan Capaian Renstra DPPPA Kota Bekasi.....	12
2.2 Analis Kinerja Pelayanan DPPPA Kota Bekasi.....	34
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPPA ...	45
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	51
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	70
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPPPA KOTA BEKASI.....	81
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	81
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi.....	85
3.3 Program dan Kegiatan.....	89
3.3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable	
Development Goals (TPB/SDGs).....	89

3.3.2	Program dan Kegiatan DPPPA Kota Bekasi 2025.....	92
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPPPA KOTA BEKASI.....	97
BAB V	PENUTUP.....	125
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPPA dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 Kota Bekasi.....	17
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi	44
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	53
Tabel 2.5	Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan Hasil Musrenbang Prioritas Tahun Anggaran 2025.....	72
Tabel 3.1	Korelasi antara Prioritas Nasional, Isu Strategi dan Strategi Utama Kota Bekasi.....	83
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026	87
Tabel 4.1	Rencana Pendanaan APBD DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025.....	99
Tabel 4.2	Rencana Kerja DPPPA Kota Bekasi Tahun 2025	102

BAB I

PENDAHALUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 126 mengamatkan bahwa Kepala Perangkat Daerah agar Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Rencana Kerja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

pencapaian Visi dan Misi Daerah serta rumusan dan sasaran prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang mengacu dan memperhatikan :

1. Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025;
2. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2025;
3. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs).

Penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2025. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 diawali dengan membuat Rancangan Akhir Rencana Kerja mengacu pada Rancangan RKPD Kota Bekasi, serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

<u>Paraf Koordinasi</u>	
<u>Kepala Bappelitbangda</u>	
<u>Kepala DPPPA</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>	

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Normenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Tahun 2016 Nomor 7);

35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);
38. Peraturan Wali kota Bekasi Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 86);
39. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 27.A);
40. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
41. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 41);
42. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 74) sebagaimana telah beberapa kali

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);

43. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2025 adalah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025, sesuai dengan rencana program prioritas yang telah digariskan dalam Rancangan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025.

Adapun tujuan penyusunan rancangan akhir Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA, rancangan PPAS Tahun 2025;
2. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke dalam rencana operasional tahunan;
3. Menyediakan arahan/pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2025;
4. Menjadi alat ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

- fungsi dan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
 7. Mencapai pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Rancangan Akhir Rencana Kerja perangkat daerah, keterkaitan antara usulan Rancangan Renja dengan Rancangan RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat daerah.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2023 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2024 (n-1); analisis kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada program dan kegiatan.

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPPP A TAHUN LALU

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP A) Kota Bekasi adalah Organisasi Perangkat Daerah yg dibentuk untuk mengemban amanah membantu Wali Kota/Wakil Wali Kota Bekasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak.

Evaluasi kinerja selain untuk menunjukkan capaian, juga berfungsi sebagai alat verifikasi apakah suatu kebijakan, program atau kegiatan, dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil proses evaluasi dapat teridentifikasi paling tidak dua hal, yaitu sejauhmana keberhasilan proses perencanaan yang dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Tahun 2024. Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi-

<u>Paraf Koordinasi</u>	
<u>Kepala Bappelitbangda</u>	
<u>Kepala DPPP A</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>	

informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025. Evaluasi atau rewiu akan dilakukan terhadap realisasi program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 serta realisasi target sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2024. Selain itu juga akan dilakukan rewiu terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dan proyeksi realisasi anggaran tahun 2026.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra periode 2024-2026. Selama periode Renstra 2024 hingga 2026 ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengalami beberapa kali penyesuaian terhadap program dan kegiatan beserta indikator kinerjanya. Program dan kegiatan beserta indikator kinerja pada tahun 2025 merupakan tahun transisi, dimana program dan kegiatan tahun 2025 mulai disusun pada tahun 2024, yakni tahun kedua periode Renstra 2024-2026 berjalan. Program dan kegiatan tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2024. Program dan kegiatan Renstra periode 2024-2026 baru benar-benar digunakan mulai tahun 2024, sehingga capaian kinerjanya pun tidak dapat dibandingkan. Dan pada tahun 2022-2023, seiring dengan adanya Rancangan Perubahan RPJMD, program dan kegiatan Perangkat Daerah pun mengalami penyempurnaan.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi 2024-2026 dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024-

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

2026. Proses perencanaan program dan kegiatan pada tahun 2024 dilakukan dengan menyelaraskan antara Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Proses pemetaan terdiri dari penyelarasan tingkat, urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dan anggaran yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi beserta jajarannya didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Walikota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Sesuai dengan APBD Penetapan Tahun Anggaran 2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki 5 program dan 18 kegiatan dan 30 sub kegiatan, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 17.230.860.360,-. Namun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan renja yang tengah berjalan, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak melakukan perubahan baik dari sisi jumlah program dan kegiatan, pendanaan serta target prioritas kinerja, namun tetap selaras dengan kebijakan Pemerintah serta mempedomani Rancangan Perubahan Renstra.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, pada Triwulan III tahun 2024 Pemerintah Kota Bekasi melaksanakan Pergeseran Anggaran berdasarkan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. Fase pergeseran ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pergeseran anggaran untuk pembayaran :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berkurang sebesar Rp. 200.000.000,- dengan adanya pegawai pensiun pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan yang bertambah sebesar Rp. 1.774.062.125,- terdiri dari :
 - APBD Kota Bekasi Tahun 2024 Rp. 288.545.000,- yang berasal dari dana alokasi insentif fiskal.
 - Bantuan Provinsi sebesar Rp. 1.485.517.125,- untuk kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
3. Program Perlindungan Khusus Anak sebesar Rp. 165.000.000,- untuk pembayaran Honorarium Jasa Tenaga Pengacara, Honorarium Jasa Tenaga Pendamping Kasus dan Honorarium Jasa Tenaga Ahli Psikolog.

Berbeda dengan penganggaran tahun 2024, proses perencanaan anggaran tahun 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam hal ini, terdapat

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

perubahan indikator kinerja yang digunakan antara tahun 2024 dengan 2025, dimana terdapat penyempurnaan indikator beserta target kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, arah kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Secara ringkas, berikut ini akan ditampilkan tabel realisasi capaian program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024 :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPPA dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024
Kota Bekasi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan DPPPA 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
					Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100	100	100	100	100%	100	300	3%
01	01	201		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	100%	100	300	3%
	01	201	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	38 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	8 Laporan	51 Laporan	6,4%
01	01	202		Kegiatan Administrasi	Persentase capaian	100	100	100	100	100%	100	300	3%

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

				Keuangan Perangkat Daerah	administrasi keuangan perangkat daerah								
	01	202	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	350 Orang	2.496 Orang	448 Orang	448 Orang	100%	672 Orang	3.616 Orang	10,33%
			05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	1 Laporan	10 Laporan	10%
					Optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100	100	100	92.17	92,17%	100	292,17	2,92%
01	01	205		Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	100	100	100	100%	100	300	3%
	01	205	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kegiatannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	-	-	-	-	1 Paket	0	0%
	01	205	09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35 Orang	20 Orang	11 Orang	11 Orang	100%	25 Orang	56 Orang	1,6%
					Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100%	100	300	3%
01	01	206		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi umum perangkat daerah	100	100	100	100	100%	100	300	3%
	01	206	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 Paket	917 Buah	5 Paket	5 Paket	100%	3 Paket	925	30,8%
	01	206	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 Paket	9.129 Unit	38 Paket	38 Paket	100%	4 Paket	9.171	229,3%
	01	206	06	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	3 Dokumen	2 Paket	2 Paket	100%	3 Paket	8	2,67%
	01	206	07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang	1 Dokumen	15.696 Buku	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	15.701	157,01%

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

				undangan	disediakan								
	01	206	08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1 Laporan	28 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Laporan	33	3,3%
	01	206	09	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	5 Dokumen	-	-	-	-	5 Dokumen	5 Dokumen	1%
	01	206	10	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	490 Laporan	150 Laporan	150 Laporan	100%	12 Laporan	652 Laporan	5,4%
					Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100	100	100	100	100%	100	300	3%
01	01	207		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100%	100	300	3%
	01	207	05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	30 Unit	-	-	-	0%	-	0	0%
	01	207	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	10 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	10 Unit	25 Unit	0%
01	01	208		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	100	100	100	100%	100	300	3%
	01	208	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	480 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	100%	12 Laporan	500 Laporan	500%
	01	208	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	804 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	100%	12 Laporan	830 Laporan	830%
01	01	209		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	100	100%	100	300	3%
	01	209	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	6 Unit	12 Unit	60 Unit	60 Unit	100%	6 Unit	78 Unit	13%

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

				Jabatan									
	01	209	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 Unit	44 Unit	156 Unit	156 Unit	100%	13 Unit	213 Unit	16,38%
	01	209	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit	298 Unit	64 Unit	64 Unit	100%	25 Unit	387 Unit	15,48%
02	02			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan									
					Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	-	100	49.90	46.97	94.13%	-	-	-
					Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	77.95	-	-	-	0%	77.90	77.90	1%
02	02	201		Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	Persentase capaian pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kab/kota	100	-	-	-	0%	100	100	1%
	02	201	03	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah perangkat daerah yang mengikuti advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG kewenangan kab/kota	-	424 OPD	44 OPD	44 OPD	100%	44 OPD	512 OPD	11.64%
	02	201	06	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	-	-	-	-	-	-	-
02	02	202		Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi	Persentase capaian pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum,	100	100	100	100	100%	100	300	3%

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

				Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kab/kota								
	02	202	02	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi kewenangan kab/kota	40 Organisasi	1.094 Orang	40 Organisasi	40 Organisasi	100%	40 Organisasi	1.174	29.35%
02	02	203		Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Persentase capaian pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	100	100	100	100	100%	100	300	3%
	02	203	01	Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	4 Lembaga	5 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	100%	4 Lembaga	13 Lembaga	3.25%
	02	203	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota yang mendapat peningkatan kapasitas	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	300 Orang	3%
	02	203	03	Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah dokumen komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota yang tersedia	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	18 Dokumen	3%
				Program Perlindungan Perempuan	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	100%					100%		
				KEGIATAN Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup	Persentase Capaian Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan	100	100	100	100	100%	100	300	3%

Paraf Koordinasi	
<u>Kepala Bappelitbangda</u>	
<u>Kepala DPPPA</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>	

				DaerahTingkat Kab/Kota	lingkup DaerahTingkat Kab/Kota								
				SUBKEGIATAN Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Perangkat Daerah	44 Perangkat Daerah	100 Perangkat Daerah	100 Perangkat Daerah	100%	100 Perangkat Daerah	244 Perangkat Daerah	2.44%
				KEGIATAN Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100	100	100	100%	100	300	3%
				SUB KEGIATAN Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	65 Orang	80 Orang	85 Orang	85 Orang	100%	65 Orang	230 Orang	3.54%
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Layanan	115 Layanan	-	-	0%	100 Layanan	215 Layanan	1.87%
				KEGIATAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100	100	100	100%	100%	300	3%
				SUBKEGIATAN Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban	4 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	9 Dokumen	2.25%

Paraf Koordinasi	
<u>Kepala Bappelitbangda</u>	
<u>Kepala DPPPA</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>	

				Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase pemenuhan Hak anak dalam 5 Klaster	100%					100%		
				KEGIATAN Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100	100	100	100%	100%	300	3%
				Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	290 Organisasi	285 Orang	290 Organisasi	290 Organisasi	100%	290 Organisasi	865 Organisasi	2.98%
				KEGIATAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100	100	100	100%	100	300	3%
				SUB KEGIATAN Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.364 Orang	697.586 Orang	2.364 Orang	2.364 Orang	100%	2.364 Orang	702.314 Orang	297.09%
				SUB KEGIATAN Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	8 Dokumen	14 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	30 Dokumen	3.75%

Paraf Koordinasi	
<u>Kepala Bappelitbangda</u>	
<u>Kepala DPPPA</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>	

				Daerah Kabupaten/Kota	Anak Kewenangan Kabupaten/Kota							
				Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	100%					100%	
				KEGIATAN Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelaksana pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	100	100	100	100%	100%	300 3%
				SUB KEGIATAN Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah Perangkat Daerah yang memperoleh advokasi dan pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA	12 Perangkat Daerah	64 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	100%	10 Perangkat Daerah	80 Perangkat Daerah 6.67%
				KEGIATAN Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelaksanaan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus koordinasi tingkat daerah kab/kota	100%	100	100	100	100%	100	300 3%
				SUB KEGIATAN Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	410 Layanan	222 Layanan	390 Layanan	390 Layanan	100%	405 Layanan	1.017 Layanan 2.48%
				SUB KEGIATAN Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapat layanan	100 Layanan	44 Layanan	15 Layanan	15 Layanan	100%	105 Layanan	164 Layanan 1.64%
				KEGIATAN Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah/Kota	Persentase capaian pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota	100%	100	100	100	100%	100	300 300%

Paraf Koordinasi	
<u>Kepala Bappelitbangda</u>	
<u>Kepala DPPPA</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>	

				SUB KEGIATAN Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	4 Dokumen	28 Dokumen	7%
--	--	--	--	---	---	--------------	---------------	---------------	---------------	------	--------------	---------------	----

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Meski demikian, tidak semua indikator kinerja merupakan indikator bermakna positif atau semakin besar realisasi berarti semakin baik. Terdapat beberapa indikator yang berlaku sebaliknya (bermakna negatif), yaitu semakin kecil capaian target berarti semakin baik.

Berikut ini merupakan rumus untuk menghitung capaian kinerja indicator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek.

Realisasi/target x 100%

- Indikator bermakna negatif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.

Jumlah Kasus/Jumlah Target x 100%

Pada tahun 2023 dari 5 (lima) indikator program yang ada, hanya 3 (tiga) indikator program telah memiliki capaian kinerja program mencapai 100% dengan interpretasi “Mencapai Target” sedangkan 2 (dua) indikator program tidak memiliki capaian kinerja program mencapai 100% atau dikatakan “Tidak Mencapai Target”. Adapun indikator kinerja program tersebut adalah :

❖ **Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan**

Tingkat partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja, dinyatakan dalam satuan persen, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam satuan persen. Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk Usia Kerja Perempuan adalah perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang kegiatannya seminggu yang lalu adalah bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, atau pengangguran/tidak bekerja, dan atau mencari pekerjaan (unemployed).

Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan artinya semakin banyak jumlah angkatan kerja perempuan terhadap penduduk usia kerja perempuan, jika tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 50 persen artinya 1 dari 2 orang penduduk usia kerja perempuan merupakan angkatan kerja.

Adapun metode atau rumus untuk menentukan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan yang dinyatakan dalam satuan persen.

❖ **Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki fungsi perlindungan terhadap perempuan dan anak, dengan terus berupaya melakukan sosialisasi dan pemberian informasi mengenai materi pengetahuan akan pencegahan serta penanganan mengenai tindak kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak. Dapat dikatakan, isu

Paraf Koordinasi	
<u>Kepala Bappelitbangda</u>	
<u>Kepala DPPPA</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>	

kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bekasi layaknya fenomena gunung es, dimana sebetulnya jumlah kasus pada tahun-tahun sebelumnya cukup besar namun belum terungkap. Seiring dengan terbukanya akses, meningkatnya keberanian dan semakin tingginya keyakinan akan adanya penyelesaian dari masyarakat, kasus-kasus semacam ini akan semakin banyak muncul dipermukaan sekaligus juga menjadi berkurang.

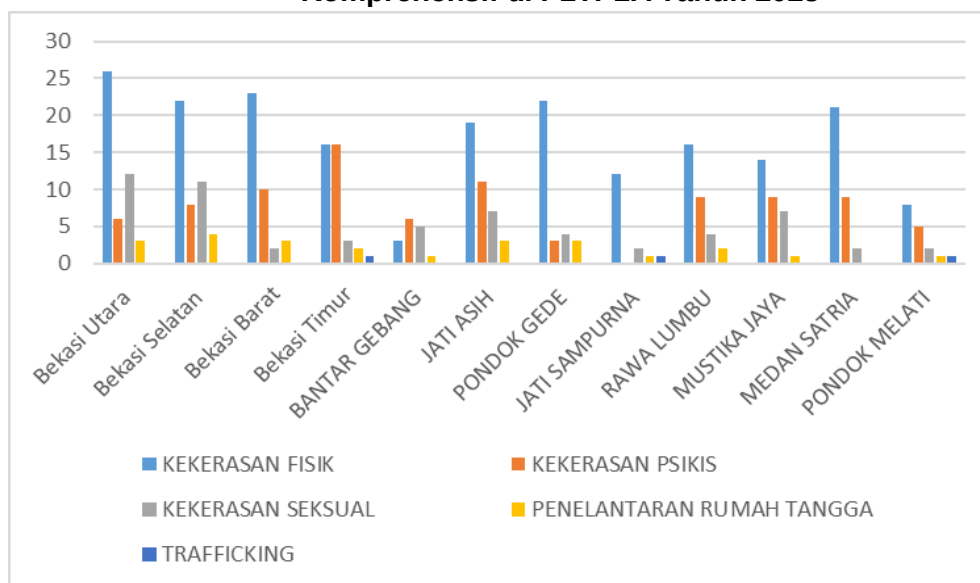
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan layanan seperti pengaduan kekerasan serta melakukan penjangkauan, pendampingan korban, layanan konseling/psikologis, dan pendampingan hukum kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, layanan konsultasi dan pendampingan hukum dilakukan oleh paralegal dan advokat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki layanan konseling dan pendampingan psikologis dari konselor maupun psikolog klinis, salah satu bentuk layanan pengaduan dan konsultasi psikolog melalui Teman Curhat Perempuan dan Anak (TERPANA).

Teman Curhat Perempuan dan Anak (TERPANA) dibentuk dengan maksud mendekatkan layanan pengaduan, informasi maupun konsultasi terkait permasalahan yang dialami oleh perempuan, anak atau keluarga dan masyarakat.

Jumlah korban kekerasan yang terdata oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada tahun 2023 berjumlah 602 orang yang terdiri dari 382 korban perempuan dan 220 korban anak. Seluruh layanan ini diberikan secara komprehensif kepada semua korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor dan atau terlapor sesuai dengan kebutuhan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Korban Kekerasan terhadap Perempuan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif di P2TP2A Tahun 2023



Sumber: P2TP2A Kota Bekasi

❖ Persentase Kota/Kabupaten Layak Anak mendapatkan predikat Madya

Untuk mendukung terciptanya Kota Bekasi sebagai kota yang mengutamakan kesetaraan gender serta ramah perempuan dan anak, pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menargetkan Kota Bekasi dapat memperoleh predikat Kota Layak Anak (KLA) dengan predikat Nindya. Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan. Penyelenggaraan evaluasi dan penilaian KLA dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan tahapan perencanaan, pra, pelaksanaan, evaluasi dan penetapan peringkat penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Pratama, Madya, Nindya dan Utama.

Upaya pencapaian indikator kinerja ini tidak hanya dari kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja, tapi juga

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

melibatkan Perangkat Daerah lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, dan lain-lain. Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 97 Tahun 2024 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten / Kota Layak Anak di Tingkat Provinsi, Kota Bekasi berhasil sesuai target mendapatkan nilai 742,34 dengan predikat Nindya.

Indikator Capaian Program Predikat Kota Layak Anak Kota Bekasi

2023		2024	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nidya	Madya	Nindya	Nindya

❖ **Persentase penanganan kasus terhadap anak**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki fungsi perlindungan terhadap perempuan dan anak, dengan terus berupaya melakukan sosialisasi dan pemberian informasi mengenai materi pengetahuan akan pencegahan serta penanganan mengenai tindak kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak. Dapat dikatakan, isu kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bekasi layaknya fenomena gunung es, dimana sebetulnya jumlah kasus pada tahun-tahun sebelumnya cukup besar namun belum terungkap. Seiring dengan terbukanya akses, meningkatnya keberanian dan semakin tingginya keyakinan akan adanya penyelesaian dari masyarakat, kasus-kasus semacam ini akan semakin banyak muncul dipermukaan sekaligus juga menjadi berkurang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan layanan seperti pengaduan kekerasan serta melakukan penjangkauan, pendampingan korban, layanan konseling/psikologis, dan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

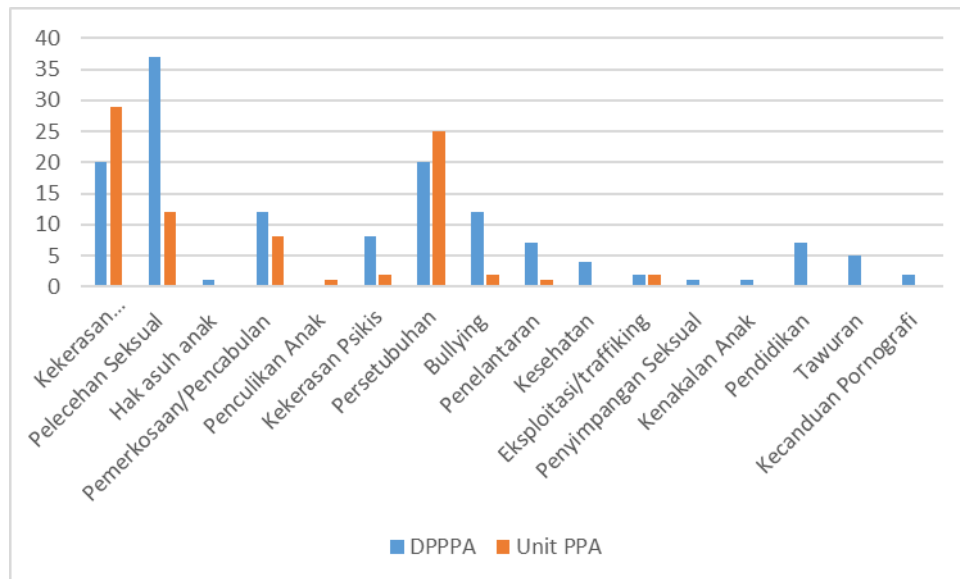
pendampingan hukum kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, layanan konsultasi dan pendampingan hukum dilakukan oleh paralegal dan advokat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki layanan konseling dan pendampingan psikologis dari konselor maupun psikolog klinis, salah satu bentuk layanan pengaduan dan konsultasi psikolog melalui Teman Curhat Perempuan dan Anak (TERPANA).

Teman Curhat Perempuan dan Anak (TERPANA) dibentuk dengan maksud mendekatkan layanan pengaduan, informasi maupun konsultasi terkait permasalahan yang dialami oleh perempuan, anak atau keluarga dan masyarakat.

Jumlah korban kekerasan yang terdata oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada tahun 2023 berjumlah 602 orang yang terdiri dari 382 korban perempuan dan 220 korban anak. Seluruh layanan ini diberikan secara komprehensif kepada semua korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melapor dan atau terlapor sesuai dengan kebutuhan.

Grafik 2.1.b
Korban Kekerasan terhadap Anak yang Mendapatkan Layanan Komprehensif di P2TP2A Tahun 2023

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	



❖ Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan program penunjang penyelenggaraan urusan kantor yang bersifat rutin, yang terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan lain- lain.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yakni Nilai Hasil Evaluasi AKIP, sumber data capaian indikator kinerja ini merupakan Hasil Evaluasi AKIP berdasarkan aktivitas yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas Instansi Pemerintah. Evaluasi AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Bekasi.

Dalam upaya pencapaian kinerja penyelenggaraan program Tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi memfokuskan pada hal-hal kunci (*Focusing on Critical Things*) Laporan Kinerja yang baik yang menunjukkan pencapaian kinerja instansi pemerintah. Fokus Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah mengarahkan daya upaya untuk untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.

Paraf Koordinasi	
<u>Kepala Bappelitbangda</u>	
<u>Kepala DPPPA</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DPPPA Kota Bekasi

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan 3 urusan wajib yaitu urusan pengarusutamaan gender dan kualitas keluarga, urusan pemenuhan hak anak dan urusan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Keluarga

Tujuan, sasaran dan program yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan kualitas keluarga adalah sebagai berikut :

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator
Terwujudnya Keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat	Indeks Pemberdayaan Gender
Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Capaian Pelaksanaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota
	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
	Persentase Capaian Pelaksanaan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota

Untuk mencapai kinerja output urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, 1 (satu) program yang dilaksanakan adalah Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Perempuan, tantangan dalam pelaksanaan kinerja urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga.

Berbeda dengan krisis sebelumnya, saat ini pekerjaan perempuan tertimpa risiko lebih besar dibandingkan pekerjaan laki-laki, terutama karena dampak penurunan pada sektor jasa. Pada saat yang sama, perempuan menjadi penyumbang sebagian besar pekerja dalam pekerjaan garis depan, terutama di sektor kesehatan dan perawatan sosial. Selain itu, meningkatnya beban perawatan tidak dibayar yang ditimbulkan oleh krisis lebih banyak berdampak pada perempuan dibandingkan laki-laki". Walau capaian program rendah, namun kegiatan-kegiatan pada DPPPA Kota Bekasi terlaksana 100%.

Dalam mengatasi tantangan di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan arahan Kepala Dinas PPPA Kota Bekasi telah berusaha meningkatkan capaian kinerja di tahun 2024 dengan melakukan updating data, melakukan koordinasi berkelanjutan dengan Perangkat Daerah lain dan para stakeholder terkait, berkenaan dengan penyediaan lapangan kerja khusus untuk perempuan, dan meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, tidak saja pada bidang swasta namun juga pada bidang pembuat keputusan seperti pada badan legislative.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemenuhan Hak Anak

Urusan ini mempunyai sasaran untuk meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak, untuk mencapai kinerja output urusan pemenuhan hak anak adalah Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator
Terwujudnya Kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat	Predikat Kota Layak Anak
Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Persentase pemenuhan Hak anak dalam 5 Klaster
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Capaian Pelaksanaan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
	Persentase Capaian Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Tolak ukur dari Program Pemenuhan Hak Anak adalah jumlah pelembagaan yang memprioritaskan pemenuhan hak anak, antara lain Pelayanan Publik Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak.

Dengan diterbitkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Sekolah Ramah Anak telah terpenuhi pemenuhan hak anak pada kluster 4, dimana tujuan sekolah ramah anak :

- Adanya keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan hak atas pendidikan bagi semua anak termasuk penyandang disabilitas, korban bencana, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, dan anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus lainnya;
- Mendorong sekolah berperan penting dalam kehidupan anak sebagai tempat belajar, pengembangan dan sosialisasi;
- Menghindari hukuman yang berakibat cedera baik secara fisik maupun

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

psikis.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pencegahan, Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Urusan ini mempunyai 2 (dua) program dan 2 (dua) indikator program Peningkatan yakni persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan persentase penanganan kasus terhadap anak.

Tujuan/Sasaran/Program	Indikator
Terwujudnya Kestaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat	- Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO - Persentase anak korban kekerasan yang ditangani
- Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO - Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran	- Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO - Persentase anak korban kekerasan yang ditangani
- Program Perlindungan Perempuan - Program Perlindungan Khusus Anak	- Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan Jakarta yang berhasil dimutakhirkan - Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak

Setiap manusia mendambakan rasa aman dan terlindungi dari rasa takut terhadap segala bentuk kekerasan. Namun tak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari setiap orang tanpa memandang jenis kelamin dan status dapat saja mendapatkan perlakuan kekerasan baik dari orang-orang terdekat maupun orang yang tidak dikenal. Negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan bagi warga negaranya termasuk negara Indonesia sebagai negara hukum. Negara Indonesia sebagaimana negara lainnya tidak lepas dari berbagai masalah hukum termasuk masalah-masalah kekerasan, karena itulah Negara melalui

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

pemerintahnya harus mampu menjamin keselamatan dan keamanan bagi warga negaranya. Sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 dan Pasal-Pasal dalam UUD tersebut dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Demikian pula dengan hak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Walaupun sudah ada beberapa peraturan yang dibuat untuk melindungi warga negara terutama perempuan dan anak yang merupakan individu yang lebih rentan dan mudah untuk menjadi korban, namun angka kekerasan yang terjadi diberbagai wilayah di Indonesia termasuk Kota Bekasi masih sangat tinggi dan cenderung bertambah setiap tahunnya.

Salah satu penyumbang besar angka kasus kekerasan perempuan adalah Kota Bekasi setiap tahunnya, kasus kekerasan perempuan tahun 2023 sebanyak 33 kasus sedang kasus kekerasan anak tahun 2023 sebanyak 220 kasus, dengan rincian kasus anak yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebanyak 139 kasus dan kasus anak yang ditangani oleh Unit PPA Polres Metro Kota Bekasi sebanyak 81 kasus.

Target kinerja pelayanan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rentang 5 (lima) tahun dapat dilihat untuk :

1. Predikat Anugerah Parahita Ekapraya

Realisasi dari tahun ke tahun sesuai target yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama.

Paraf Koordinasi	
<u>Kepala Bappelitbangda</u>	
<u>Kepala DPPPA</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>	

2. Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO

Realisasi Target Indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 **tidak mencapai target**, dimana kasus dari tahun ke tahun meningkat. Pencapaian Indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO pada Tahun 2023 target adalah 1 : 4.750, sedangkan realisasi Tahun 2023 1 : 2.380. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi untuk Indikator Rasio Kekerasan terhadap Perempuan dan TPPO Tahun 2023 **tidak mencapai target**, ketidakcapaian target di Tahun 2023 dikarenakan masih banyak kekerasan yang dialami oleh Perempuan di Kota Bekasi, untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan di Kota Bekasi Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi melaksanakan sosialisasi dan kampanye atas kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Predikat Kota Layak Anak

Realisasi Target Indikator Predikat Kota Layak Anak dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023, pada Tahun 2020 melebihi target yang mana target Tahun 2020 predikat Madya dan realisasinya predikat Nindya. Di Tahun 2020 Predikat Kota Layak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki prestasi yang bagus, akan tetapi prestasi tersebut tidak bisa dipertahankan pada Tahun 2023. Pencapaian Indikator Predikat Kota Layak Anak Tahun 2023 dengan target Nindya dengan hasil **tidak sesuai target** turun menjadi Madya, dengan ketidak berhasilnya karena Kurangnya pemenuhan data pada indikator penilaian KLA dengan adanya perubahan dalam komponen penilaian dari tahun sebelumnya

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

sehingga data pendukung yang disiapkan dianggap tidak memenuhi syarat verifikasi penilaian oleh Kementerian PPPA sehingga banyak yang tidak terpenuhi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi memperbaiki kesalahan di tahun 2023 sehingga untuk Tahun 2024 bisa mencapai target, dimana Tahun 2024 **target sesuai** dengan predikat Nindya sesuai Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024 – 2026. Adapun Nilai Kota Layak Anak yang didapat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi pada Tabel dibawah ini :

Paraf Koordinasi	
<u>Kepala Bappelitbangda</u>	
<u>Kepala DPPPA</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>	

Provinsi	Kabupaten/Kota	Nilai Bobot EM	Nilai Bobot VA
JAWA BARAT	DEPOK KOTA	993.83	940.75
JAWA BARAT	BOGOR KOTA	987.90	850.59
JAWA BARAT	SUKABUMI KABUPATEN	940.11	848.16
JAWA BARAT	BANDUNG KOTA	962.20	841.32
JAWA BARAT	PANGANDARAN KABUPATEN	934.85	780.71
JAWA BARAT	BEKASI KABUPATEN	854.29	780.61
JAWA BARAT	BANDUNG KABUPATEN	914.39	767.39
JAWA BARAT	BEKASI KOTA	952.82	742.34
JAWA BARAT	SUMEDANG KABUPATEN	930.78	734.92
JAWA BARAT	KARAWANG KABUPATEN	953.77	731.97
JAWA BARAT	PURWAKARTA KABUPATEN	906.01	724.35
JAWA BARAT	CIANJUR KABUPATEN	911.71	722.67
JAWA BARAT	GARUT KABUPATEN	918.35	671.74
JAWA BARAT	TASIKMALAYA KABUPATEN	902.72	666.43
JAWA BARAT	CIREBON KABUPATEN	872.67	661.36
JAWA BARAT	SUBANG KABUPATEN	858.70	645.31
JAWA BARAT	INDRAMAYU KABUPATEN	873.07	640.10
JAWA BARAT	BANJAR KOTA	992.00	639.95
JAWA BARAT	BOGOR KABUPATEN	942.30	639.91
JAWA BARAT	CIREBON KOTA	906.12	638.52
JAWA BARAT	SUKABUMI KOTA	846.74	638.37
JAWA BARAT	CIAMIS KABUPATEN	775.91	625.54
JAWA BARAT	KUNINGAN KABUPATEN	750.65	622.88
JAWA BARAT	CIMAHI KOTA	839.95	612.79
JAWA BARAT	BANDUNG BARAT KABUPATEN	882.06	585.15
JAWA BARAT	TASIKMALAYA KOTA	804.67	563.28
JAWA BARAT	MAJALENGKA KABUPATEN	821.23	550.03

Dari tabel diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi mendapat Nilai Kota Layak Anak sebesar 742.34, untuk skor predikat Kota Layak Anak :

- Pratama Skor 500 – 600
- Madya Skor 601 – 700
- Nindya Skor 701 – 800
- Utama Skor 801 – 900

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

- KLA Skor 901 – 1.000

4. Persentase Penurunan Tindak Kekerasan terhadap Anak

Realisasi Target Indikator Persentase Penurunan Tindak Kekerasan terhadap Anak dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 **tidak mencapai target**, dimana kasus dari tahun ke tahun meningkat. Pencapaian Indikator Persentase Penurunan Tindak Kekerasan terhadap Anak tahun 2023 **tidak mencapai target**, dimana target Tahun 2023 sebesar 0.02% sedangkan realisasi sebesar 0.03% terjadi kenaikan 0.01%, ketidakcapaian target saat realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin kurang baik. Akan tetapi, semakin banyak kasus yang dilaporkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah keberhasilan dari Sosialisasi yang dilaksanakan di Sekolah-Sekolah yang ada di Kota Bekasi, sehingga banyak korban yang berani untuk melaporkan kasus yang terjadi pada diri sendiri atau dari tetangga, kerabat, dan keluarga korban tersebut.

5. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan publik yang akuntabel

Realisasi Target Indikator meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan publik yang akuntabel dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 **mencapai target**, dimana realisasi melebihi dari target. Pencapaian Indikator kualitas pelayanan administrasi dan publik yang akuntabel Tahun 2023 **mencapai target bahkan melebihi dari target**, hasil evaluasi menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator sasaran Nilai AKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi berkinerja baik sehingga mencapai target, indikator sasaran akan tercapai dengan hasil yang baik apabila ditunjang dengan Capaian Indikator

Paraf Koordinasi	
<u>Kepala Bappelitbangda</u>	
<u>Kepala DPPPA</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>	

Program yang baik pula dan Indikator Program dapat tercapai dengan hasil yang baik apabila ditunjang dengan hasil Capaian Indikator Kegiatan yang baik dan untuk mendapat capaian indikator kegiatan yang baik, perlu adanya dukungan sumber daya manusia yang ahli dan dukungan anggaran yang memadai. Adapun rincian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dijabarkan melalui tabel 2.2 adalah sebagai berikut :

Paraf Koordinasi	
<u>Kepala Bappelitbangda</u>	
<u>Kepala DPPPA</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>	

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi

No	Indikator	SPM /Standar nasional	IKK	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah						Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Predikat Anugerah Parahita Ekapraya	-	-	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Pratama	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	
2	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	-	1 : 6.649	1 : 4.000	1 : 4.250	1 : 4.500	1 : 4.750	23.00	22.90	1 : 4.545	1 : 4.347	1 : 3.305	1 : 2.380	1 : 2.500	1 : 2.300	
3	Predikat Kota Layak Anak	500 – 1.000	-	Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Madya	Nindya	Nindya	
4	Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak	-	100%	0,035%	0,030%	0.025%	0.020%	0.029%	0.028%	0.024%	0.028%	0.024%	0.030%	0.25%	0.25%	Dalam IKK 100% untuk Pelayanan Kasus Kekerasan terhadap Anak
5	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi dan publik yang akuntabel	-	-	B (65)	B (69)	BB (75)	BB (76)	BB (75)	BB (75.10)	BB (74.39)	BB (75.37)	BB (76.41)	BB (76.99)	A (80.35)	BB (76)	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintahan bidang pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintahan bidang pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintahan bidang pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

- Pengkoordinasian norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintahan bidang pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintahan bidang pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintahan bidang pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Penegakan peraturan perundang-undangan daerah urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintahan bidang pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Pengkoordinasian pengentasan/penanggulangan kemiskinan;
- Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian dukungan pengelolaan kemitraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintahan bidang pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintahan bidang pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

- Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemerintahan bidang pemenuhan hak anak dan bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota dan/atau Sekretaris Daerah.

Dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan koordinasi dan sinergi program dengan beberapa kementerian dan lembaga. Ketiga urusan yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih terdapat permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

1. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen;
2. Adanya keterlambatan update data partisipasi angkatan kerja perempuan pada Website Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat;

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

3. Perencanaan yang Responsif Gender belum optimal dilaksanakan karena belum adanya Aplikasi Anggaran Responsif yang bisa memilah Gender Analysisist Pathway (GAP) dan Gender Budgeting System (GBS);
4. Kurangnya kegiatan promotif dan preventif terhadap permasalahan perempuan dari tindak kekerasan;
5. Kurangnya SDM pelayanan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan;
6. Masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan perempuan (KDRT);
7. Kurangnya koordinasi, kerjasama dan sinergitas untuk menciptakan Kota Bekasi Layak Anak diantara para stakeholders, dunia usaha dan masyarakat;
8. Kurang respons Tim Gugus tugas KLA;
9. Kurang berfungsinya sarana dan prasarana Rumah Pintar yang disediakan;
10. Kurangnya kuantitas SDM pada DPPPA Kota Bekasi karena banyaknya ASN yang telah memasuki masa purnabhakti;
11. Kurangnya kegiatan promotif dan preventif terhadap permasalahan anak dari tindak kekerasan;
12. Belum berfungsinya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak;
13. Kurangnya SDM pelayanan pendampingan kasus kekerasan terhadap anak.

Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan tindak kekerasan terhadap anak Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada program pembangunan daerah serta

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

terhadap capaian program nasional seperti SDGs. Melihat dari permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, antara lain :

➤ Tantangan

- Kurangnya pemahaman tentang gender
- Belum lengkapnya data terpilah gender pada beberapa instansi
- Kurangnya motivasi perempuan untuk berdaya dan berdikari dalam sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum
- Kualitas hidup perempuan masih rendah di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum
- Belum meratanya pemahaman masyarakat akan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- Masih adanya kekerasan terhadap perempuan
- Masih adanya TPPO
- Pengaruh Media Sosial
- Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan perempuan
- Perempuan yang kurang berdaya
- Kurangnya data SDM kurang memahami informasi dan adanya perubahan/mutasi pegawai
- Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) masih rendah
- Persentase Puskesmas Ramah Anak masih rendah
- Rumah pintar belum optimal
- Belum terbentuknya Forum Anak Kota Bekasi (Foraksi) Tingkat Kelurahan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

- Belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat
- Masih adanya kekerasan terhadap anak
- Kurangnya pemahaman pola asuh yang baik (parenting)
- Faktor lingkungan yang kurang baik untuk tumbuh kembang anak
- Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan anak

➤ Peluang

- Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan agenda Pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang belum tercapai, yang antara lain permasalahan kesehatan ibu dan anak, akses terhadap air bersih dan sanitasi, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta status nutrisi.
- Telah tersertifikasinya lembaga P2TP2A Kota Bekasi yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak
- Adanya kerjasama yang telah terbangun antara Rumah Sakit, Puskesmas, Aparat Penegak Hukum dan lintas kementerian lainnya dalam upaya perlindungan perempuan dan anak
- Adanya dukungan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Politik, Kader Pemberdayaan binaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah dan Stakeholder dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat serta pengembangan, pemasyarakatan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
- Partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam pemanfaatan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Berdasarkan tantangan dan peluang di atas, maka dirumuskanlah isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2025, diantaranya :

1. Optimalisasi program perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kota Bekasi;
2. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas usaha masyarakat;
3. Pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas keluarga, termasuk penyediaan basis data yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengetahui keadaan serta kebutuhan riil keluarga yang ada di Kota Bekasi;
4. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan;
5. Pengembangan kompetensi pegawai dalam kinerja birokrasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal SKPD

Rancangan awal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja OPD, dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Dalam dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya, melalui dokumen

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi. Penjabaran dari rancangan awal rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Kota Bekasi Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	9.138.654.440	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Nilai AKIP		8.886.876.144	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100 %	204.000.000	KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	200.000.000	-	-	-	-	-	Penyusunan Laporan Perencanaan untuk Wali Kota Terpilih 2024
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	4 Laporan	4.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Kota Bekasi, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	8 Laporan	10.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kel/Desa	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kel/Desa	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.028.399.600	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.967.934.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	932 Orang/bulan	7.026.399.600	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang	6.957.934.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat	100 %	85.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	75.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

			Daerah								
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	85.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	75.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	728.000.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	605.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	25.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 Paket	15.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	253.000.600	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket	210.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	125.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3 Paket	115.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	1 Dokumen	20.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	1 Dokumen	50.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

	undangan	Kel/Desa	Perundang-Undangan yang Disediakan			undangan	Kel/Desa				
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	15.000.000	
	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	215.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	215.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	75.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	250.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	200.412.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	Pembentukan UPTD PPA
	Pengadaan Mebel	Kota Bekasi, Semua Kecamatan,	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	50.412.000	Pengadaan Mebel	Kota Bekasi, Semua Kecamatan,	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

		Semua Kel/Desa					Semua Kel/Desa				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	350.842.240	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	873.942.144	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	40.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	310.842.240	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	833.942.144	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	542.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	355.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	300.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	200.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	207.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	120.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	35.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	35.000.000	
2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	78 %	5.172.000.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	77,95%	3.830.000.000	
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan	100 %	250.000.000	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua	PERSENTASE PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER	100%	430.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

	Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kel/Desa	Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KAB/KOTA	Kel/Desa	(PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KAB/KOTA			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	100 Orang	250.000.000	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PUG TERMASUK PPRG	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Kab/Kota	44 OPD	430.000.000	
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	487.000.000	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PERSENTASE PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	100%	325.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan,	Jumlah Organisasi Masyarakat yang	40 Organisasi	487.000.000	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN	Kota Bekasi, Semua Kecamatan,	Jumlah Organisasi Masyarakat yang	40 Organisasi	325.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

	Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Semua Kel/Desa	Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	Semua Kel/Desa	mendapat Advokasi Kebijakan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Pelaksanaan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	100 %	4.435.000.000	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PERSENTASE PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA	100%	3.075.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	4 Lembaga	3.385.000.000	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN KEPADA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PERSENTASE PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA	4 Lembaga	1.525.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	900.000.000	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	100 Orang	1.225.000.000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Dokumen	150.000.000	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KAB/KOTA	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota yang mendapat peningkatan Kapasitas	6 Dokumen	325.000.000	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	100 %	803.275.400	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	100%	895.000.000	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup	100 %	75.000.000	Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup DaerahTingkat Kab/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup DaerahTingkat	100%	150.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

			DaerahTingkat Kab/Kota					Kab/Kota			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	44 Perangkat Daerah	75.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Perangkat Daerah	150.000.000	
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	300.000.000	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	495.000.000	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	90 Orang	300.000.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	65 Orang	380.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Layanan	115.000.000	
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	428.275.400	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	250.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	4 Dokumen	428.275.400	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 dokumen	250.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

			Kabupaten/Kota								
4	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan Hak anak dalam 5 Klaster	76 %	1.656.868.000	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase pemenuhan Hak anak dalam 5 Klaster	75%	2.200.000.000	
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Capaian Pelaksanaan Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	1.071.868.000	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	1.150.000.000	
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	290 Organisasi	1.071.868.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	290 Organisasi	1.150.000.000	
	Penguatan dan	Kota Bekasi,	Persentase	100 %	585.000.000	Penguatan dan	Kota Bekasi,	Persentase	100%	1.050.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Capaian Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2364 Orang	425.000.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2364 Orang	725.000.000	
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	7 Dokumen	160.000.000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bgai Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bgai Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	325.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

			Kabupaten/Kota								
5	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	100 %	1.584.900.000	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase penanganan kasus terhadap anak	100%	2.030.000.000	
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase capaian pelaksana pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100 %	254.400.000	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	325.000.000	
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	500 Orang	254.400.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Pogram dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Perangkat Daerah	325.000.000	
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang	Kota Bekasi, Semua Kecamatan,	Persentase capaian pelaksanaan	100 %	815.500.000	Penyediaan Layanan bagi Anak yang	Kota Bekasi, Semua Kecamatan,	Persentase Penyediaan Layanan bagi	100%	1.205.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

	Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kel/Desa	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	125 Orang	815.500.000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	410 orang	625.000.000	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	115 Layanan	305.000.000	
						Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua	Jumlah dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	4 dokumen	275.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

						yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kel/Desa	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase capaian pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	515.000.000	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	500.000.000	
	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	3 Kegiatan	515.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/	12 Dokumen	500.000.000	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

								Kota			
JUMLAH					18.355.697.840					17.841.876.144	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan program dan kegiatan dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan di gabungan dari bawah keatas (BOTTOM – UP) maupun dari atas kebawah (TOP – DOWN) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodir secara baik serta usulan tersebut dapat disesuaikan dengan penyelenggaraan tupoksi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Program Prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah :

- 2.4.01.1.01 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- 2.4.01.1.02 Program Perlindungan Perempuan
- 2.4.01.1.03 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Paraf Koordinasi	
<u>Kepala Bappelitbangda</u>	
<u>Kepala DPPPA</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>	

2.4.01.1.04 Program Perlindungan Khusus Anak

2.4.01.1.05 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Adapun usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan pada tahun 2025 yang diharapkan dapat ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tabel :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025

KOTA BEKASI

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	FRAKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	HASIL DESK
6	586009	26-02-2024	ADHIKA DIRGANTARA S.Kom	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	Hibah Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Rambutan IV Rt 03 Rw 02 Jakumulya	Rt 03 Rw 02 Jakumulya Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah dipaparkan	Lengkapi Proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	15.000.000
30	701436	27-02-2024	ADHIKA DIRGANTARA S.Kom	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	Hibah Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Flamboyen 1 Rw 01 Kayuringin Jaya	Posyandu Flamboyen 1 Rw 01 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan , Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah dipaparkan	Lengkap Proposal, Posyandu binaan DP3A	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	15.000.000
31	701476	27-02-2024	ADHIKA DIRGANTARA S.Kom	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	Hibah Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Flamboyen 5 Rw 01 Kayuringin Jaya	Posyandu Flamboyen 5 Rw 01 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan , Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah dipaparkan	Lengkap Proposal, Posyandu Binaan DP3A	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	15.000.000
32	701484	27-02-2024	ADHIKA DIRGANTARA S.Kom	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	Hibah Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Flamboyen 7 Rw 01 Kayuringin Jaya	Posyandu Flamboyen 7 Rw 01 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan , Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah dipaparkan	Lengkapi Proposal, posyandu binaan DP3A	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	15.000.000
33	701502	27-02-2024	ADHIKA DIRGANTARA S.Kom	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	Hibah Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Mawar 1 Rw 02 Kayuringin Jaya	Posyandu Mawar 1 Rw 02 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan , Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah dipaparkan	Lengkapi Proposal, posyandu binaan DP3A	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	15.000.000
34	701515	27-02-2024	ADHIKA DIRGANTARA S.Kom	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	Hibah Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Mawar 2 Rw 02 Kayuringin Jaya	Posyandu Mawar 2 Rw 02 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan , Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah dipaparkan	Lengkapi Proposal, posyandu binaan DP3A	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	15.000.000
35	701522	27-02-2024	ADHIKA DIRGANTARA S.Kom	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	Hibah Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Alamanda 2 Rw 04 Kayuringin Jaya	Posyandu Alamanda 2 Rw 04 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan , Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah dipaparkan	Lengkapi Proposal, posyandu binaan DP3A	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	15.000.000

Paraf Koordinator	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

36	701534	27-02-2024	ADHIKA DIRGANTARA S.Kom	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	Hibah Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Teratai Merah Rw 05 Kayuringin Jaya	Posyandu Teratai Merah Rw05 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan , Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah diparipurnakan	Lengkap Proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	15.000.000
37	702550	27-02-2024	ADHIKA DIRGANTARA S.Kom	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	Hibah Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Teratai Putih Rw 05 Kayuringin Jaya	Posyandu Teratai Putih Rw 05 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan , Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah diparipurnakan	Lengkapi proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	15.000.000
38	702556	27-02-2024	ADHIKA DIRGANTARA S.Kom	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	Hibah Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Lestari Rw 06 Kayuringin Jaya	Posyandu Lestari Rw 06 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan , Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah diparipurnakan	Lengkapi proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	15.000.000
39	702585	27-02-2024	ADHIKA DIRGANTARA S.Kom	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	Hibah Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Melur Rw 07 Kayuringin Jaya	Posyandu Melur Rw 07 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan , Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah diparipurnakan	Lengkapi proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	15.000.000

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	FRAKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SRPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	MASIL DESK
40	702836	27-02-2024	ADHIKA DIRGANTARA S.Kom	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	Hibah Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Kenanga 2 Rw 08 Kayuringin Jaya	Posyandu Kenanga 2 Rw 08 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan , Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah dipaparkan	Lengkapi proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	15.000.000
41	703938	27-02-2024	ADHIKA DIRGANTARA S.Kom	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	Hibah Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Bunga Tanjung Rw 012 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan , Kota Bekasi	Posyandu Bunga Tanjung Rw 012 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan , Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah dipaparkan	Lengkapi proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	15.000.000
42	703953	27-02-2024	ADHIKA DIRGANTARA S.Kom	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	Hibah Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Parkit Rw 23 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan , Kota Bekasi	Posyandu Parkit Rw 23 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan , Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah dipaparkan	Lengkapi proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	15.000.000
43	703961	27-02-2024	ADHIKA DIRGANTARA S.Kom	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	Hibah Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Nusa Indah 1 Rw 11 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan , Kota Bekasi	Posyandu Nusa Indah 1 Rw 11 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan , Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah dipaparkan	Lengkapi proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	15.000.000
44	703971	27-02-2024	ADHIKA DIRGANTARA S.Kom	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	Hibah Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Catelnya Rw 26 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan , Kota Bekasi	Posyandu Catelnya Rw 26 Kayuringin Jaya Bekasi Selatan , Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah dipaparkan	Lengkapi proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	15.000.000
1174	530480	15-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Kenanga 1 RT.3 RW.2 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati	Posyandu Kenanga 1 RT.3 RW.2 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses III Tahun 2023 yang telah di PApurnakan	Lengkapi Proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000
1175	530481	15-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Kenanga 2 RT.4 RW.2 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati	Posyandu Kenanga 2 RT.4 RW.2 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses III Tahun 2023 yang telah di PApurnakan	Lengkapi Proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000
1178	530485	15-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Bogenvil RT.1 RW.4 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati	Posyandu Bogenvil RT.1 RW.4 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses III Tahun 2023 yang telah di PApurnakan	Lengkapi Proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000
1179	530486	15-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Flamboyen 2 RT.2 RW.4 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati	Posyandu Flamboyen 2 RT.2 RW.4 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses III Tahun 2023 yang telah di PApurnakan	Lengkapi Proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

1180	530487	15-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Flamboyan 1 RT.3 RW.4 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati	Posyandu Flamboyan 1 RT.3 RW.4 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses III Tahun 2023 yang telah di PARIpurnakan	Lengkapi Proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000
1181	530488	15-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Cemara RT.4 RW.4 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati	Posyandu Cemara RT.4 RW.4 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses III Tahun 2023 yang telah di PARIpurnakan	Lengkapi Proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	FRAKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SRPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	MASIL DESK
1182	530489	15-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Cendana RT.9 RW.4 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati	Posyandu Cendana RT.9 RW.4 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses III Tahun 2023 yang telah di Paripurnakan	Lengkapi Proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000
1185	530493	15-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Angrek 1 RT.6 RW.3 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati	Posyandu Angrek 1 RT.6 RW.3 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses III Tahun 2023 yang telah di Paripurnakan	Lengkapi Proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000
1186	530494	15-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Angrek 2 Gg. Nur Hikmah RT.2 RW.3 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati	Posyandu Angrek 2 Gg. Nur Hikmah RT.2 RW.3 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses III Tahun 2023 yang telah di Paripurnakan	Lengkapi Proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000
1189	530497	15-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Menur 1 RT.4 RW.5 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati	Posyandu Menur 1 RT.4 RW.5 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses III Tahun 2023 yang telah di Paripurnakan	Lengkapi Proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000
1190	530498	15-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Menur 2 RT.5 RW.5 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati	Posyandu Menur 2 RT.5 RW.5 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses III Tahun 2023 yang telah di Paripurnakan	Lengkapi Proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000
1193	530502	15-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Sri Rejeki Kp. Asem RT. RW.6 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati	Posyandu Sri Rejeki Kp. Asem RT. RW.6 Kel.Jatimelati Kec.Pondok Melati, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses III Tahun 2023 yang telah di Paripurnakan	Lengkapi Proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000
1219	530649	15-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Wijaya Kusuma, komp.Graha Indah RT.1 RW.13 Kel.Jatimekar Kec.Jatiasih	Posyandu Wijaya Kusuma, komp.Graha Indah RT.1 RW.13 Kel.Jatimekar Kec.Jatiasih, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah diparipurnakan	Lengkapi Proposal, Posyandu binaan DP3A	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000
1220	530650	15-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Gratera, komp.Graha Indah RT.1 RW.14 Kel.Jatimekar Kec.Jatiasih	Posyandu Gratera, komp.Graha Indah RT.1 RW.14 Kel.Jatimekar Kec.Jatiasih, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah diparipurnakan	Lengkapi Proposal, posyandu binaan DP3A	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000
1221	530651	15-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Angrek Bulan I, Kp. Jaha RT.9 RW.11 Kel.Jatimekar Kec.Jatiasih	Posyandu Angrek Bulan I, Kp. Jaha RT.9 RW.11 Kel.Jatimekar Kec.Jatiasih, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	Lengkapi Proposal, posyandu binaan DP3A	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

1222	530653	15-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Anggrek Bulan II, Kp. Jaha RT.3 RW.11 Kel.Jatimekar Kec.Jatiasih	Posyandu Anggrek Bulan II, Kp. Jaha RT.3 RW.11 Kel.Jatimekar Kec.Jatiasih, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah diparipurnakan	Lengkapi Proposal, posyandu binaan DP3A	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000
1223	530654	15-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Anggrek Mawar, Kp. Jaha RT.4 RW.11 Kel.Jatimekar Kec.Jatiasih	Posyandu Anggrek Mawar, Kp. Jaha RT.4 RW.11 Kel.Jatimekar Kec.Jatiasih, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah diparipurnakan	Lengkapi Proposal, posyandu binaan DP3A	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

NO	ID USULAN	TANGGAL USUL	PENGUSUL	FRAKSI	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	USULAN KE	OPD TUJUAN AKHIR	STATUS	CATATAN	REKOMENDASI SEKWAN	REKOMENDASI MITRA	REKOMENDASI SKPD	REKOMENDASI TAPD	VOLUME	SATUAN	HASIL DESK
1224	530655	15-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Anggrek Melati, Kp. Jaha RT.1 RW.11 Kel.Jatimekar Kec.Jatiasih	Posyandu Anggrek Melati, Kp. Jaha RT.1 RW.11 Kel.Jatimekar Kec.Jatiasih, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah dipaparkan	Lengkapi Proposal, posyandu binaan DP3A	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000
1226	530658	15-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Flamboyan RT.5 RW.3 Kel.Jatimekar Kec.Jatiasih	Posyandu Flamboyan RT.5 RW.3 Kel.Jatimekar Kec.Jatiasih, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah dipaparkan	Lengkapi Proposal, posyandu binaan DP3A	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000
1227	530661	15-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Sedap Malam 1, Kp.Pedurenan, J.L.H. Tekel RT.4 RW.11 Kel.Jatihuhur Kec.Jatiasih	Posyandu Sedap Malam 1, Kp.Pedurenan, J.L.H. Tekel RT.4 RW.11 Kel.Jatihuhur Kec.Jatiasih, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah dipaparkan	Lengkapi Proposal, posyandu binaan DP3A	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000
1228	530662	15-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Sedap Malam 2, Kp.Pedurenan, J.L.H. Tekel RT.3 RW.11 Kel.Jatihuhur Kec.Jatiasih	Posyandu Sedap Malam 2, Kp.Pedurenan, J.L.H. Tekel RT.3 RW.11 Kel.Jatihuhur Kec.Jatiasih, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah dipaparkan	Lengkapi Proposal, posyandu binaan DP3A	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000
1229	530663	15-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Sedap Malam 3, Kp.Pedurenan, J.L.H. Tekel RT.2 RW.11 Kel.Jatihuhur Kec.Jatiasih	Posyandu Sedap Malam 3, Kp.Pedurenan, J.L.H. Tekel RT.2 RW.11 Kel.Jatihuhur Kec.Jatiasih, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah dipaparkan	Lengkapi Proposal, posyandu binaan DP3A	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000
1234	534040	18-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Melati Suci J.L.Melati 4 Bumi Dirgantara Permai RT.4 RW.17 Kel.Jatisari Kec.Jatiasih	Posyandu Melati Suci J.L.Melati 4 Bumi Dirgantara Permai RT.4 RW.17 Kel.Jatisari Kec.Jatiasih, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah dipaparkan	Lengkapi Proposal, posyandu binaan DP3A	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000
1236	553801	25-01-2024	LATU HAR HARY	PKS	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Hibah untuk Masyarakat Posyandu Anyelir 1, J.L. Jawa RT.8 RW.14 Kel.Jatisari Kec.Jatiasih	Posyandu Anyelir 1, J.L. Jawa RT.8 RW.14 Kel.Jatisari Kec.Jatiasih, Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah dipaparkan	Lengkapi Proposal, posyandu binaan DP3A	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	paket	10.000.000
3974	688150	26-02-2024	ANIM IMAMUDIN, SE., MM	PDI-P	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	Permohonan Bantuan Dana untuk sarana dan Prasarana kegiatan Posyandu RT 01 RW 06 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna	Posyandu RT 01 RW 06 Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna , Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I tahun 2024 yang telah di Paparkan	Lengkapi Proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	1	Paket	15.000.000

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

4306	704357	27-02-2024	SODIKIN, SH	DEMOKRA T	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Hibah barang untuk masyarakat	Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu (Laptop, Printer, AC, Mejadan Kursi) Se Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi	31 Posyandu Se Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi , Kota Bekasi	Kabupaten / Kota	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Ditolak	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	Pokir Hasil Reses I Tahun 2024 yang telah dipaparkan	Lengkapi proposal	Akan diakomodir oleh Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan kelengkapan proposal usulan	-	31	paket	500.000.000	
																						995.000.000

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Banyaknya kegiatan-kegiatan yang menjadi usulan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi terkait dengan kegiatan Posyandu, forum anak dan pelatihan/pendampingan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini sesuai dengan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Bekasi, yaitu tentang pemenuhan hak-hak anak, perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DPPPA KOTA BEKASI

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu yang menjadi rujukan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Bekasi dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 adalah Kebijakan Nasional. Merujuk pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini memiliki tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah :

“INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”

Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.

- Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara

<u>Paraf Koordinasi</u>	
<u>Kepala Bappelitbangda</u>	
<u>Kepala DPPPA</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>	

maupun bangsa. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantungan antarbangsa semakin kuat. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

- Kemajuan suatu bangsa juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu bangsa dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.
- Keadilan dan kemakmuran harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan :
 1. Taraf kehidupan;
 2. Memperoleh lapangan pekerjaan;
 3. Mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik;
 4. Mengamankan dan mempertahankan negara;
 5. Mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum.

Dengan demikian, bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Arah Kebijakan pembangunan nasional tahun 2025 menekankan pada :

1. Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi;
2. Arah Kebijakan Tingkat Pengangguran Terbuka;
3. Arah Kebijakan Tingkat Kemiskinan;
4. Arah Kebijakan Rasio Gini;
5. Arah Kebijakan Indeks Modal Manusia;
6. Arah Kebijakan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca;
7. Arah Kebijakan Nilai Tukar Petani;
8. Arah Kebijakan Nilai Tukar Nelayan.

Merujuk kepada 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan nasional tersebut, kemudian diuraikan oleh Pemerintah Kota Bekasi ke dalam Isu Strategis Pemerintah Kota Bekasi yang dimuat dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan Strategi Utama Kota Bekasi Tahun 2025. Kesenambungan antara Prioritas Nasional, Isu Strategis Kota Bekasi dan Strategi Utama Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Korelasi antara Prioritas Nasional, Isu Strategis, dan Strategi Utama Kota Bekasi Tahun 2025

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2025					
NASIONAL		JAWA BARAT		KOTA BEKASI	
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		Pemerataan Pembangunan untuk Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Jawa Barat		Penguatan Kualitas Manusia Melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan dan Ketahanan Keluarga yang Inklusif dan Merata	
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Azasi Manusia (HAM)	6	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	14	Peningkatan Kualitas Layanan Publik
				16	Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah
2	Memantapkan Sistem Pertanahan Keamanan Negara dan mendorong kemandiraian bangsa	1	Pertumbuhan ekonomi berbasis peningkatan kapasitas UMKM, petani, nelayan dan budidaya untuk	7	Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
				12	Pengembangan

<u>Paraf Koordinasi</u>	
<u>Kepala Bappelitbangda</u>	
<u>Kepala DPPPA</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>	

	melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru		membuka lapangan kerja seluas-luasnya		kampung-kampung tematik dalam pemberdayaan wisata lokal
		5	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup serta gerakan membangun desa	8	Peningkatan “urban farming”
		6	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	14	Peningkatan Kualitas Layanan Publik
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	1	Pertumbuhan ekonomi berbasis peningkatan kapasitas UMKM, petani, nelayan dan budidaya untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya	6	"link and match" pemuda melalui program pemagangan dan penempatan kerja dengan dunia usaha
				7	Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
				12	Pengembangan kampung-kampung tematik dalam pemberdayaan wisata lokal
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	2	Reformasi sistem pendidikan, pemajuan kebudayaan, pendidikan agama dan kehidupan beragama	1	Pemerataan akses dan peningkatan kualitas Pendidikan
				6	"link and match" pemuda melalui program pemagangan dan penempatan kerja dengan dunia usaha
		3	Penguatan sistem kesehatan daerah	2	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
				3	Prevalensi penurunan stunting
		4	Penguatan sistem perlindungan sosial dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana	11	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
				13	Optimalisasi Bekasi Quick Respon (BQR)

Sumber : Dokumen RKPD Kota Bekasi Tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi selaku pengemban 3 urusan pemerintahan, yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga, urusan pemenuhan hak anak dan urusan pencegahan dan penanganan kasus terhadap perempuan dan anak, memiliki kontribusi dalam mendukung agenda pembangunan yakni :

2.5.1.1.1 Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeditbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

2.5.1.1.2 Peningkatan Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah

2.5.1.1.3 Prevalensi Penurunan Stunting

2.5.1.1.4 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga menciptakan manajemen kinerja yang bertujuan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.

Kota Bekasi akan memiliki generasi anak yang cerdas, ceria dan berkualitas apabila mampu menjamin pemenuhan hak dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan yang salah lainnya pada anak. Dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia dan masyarakat yang berkualitas diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan yang disertai dengan meningkatnya kesetaraan gender diseluruh bidang pembangunan, serta pencegahan dan penanganan tindak kekerasan perempuan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan penjabaran dari tahun ke-2 Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi periode Tahun 2024-2026. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dengan tetap berpedoman pada sasaran dan prioritas

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

pembangunan daerah tahun 2025.

Tujuan pembangunan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak dan perlindungan perempuan dan anak :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG).
2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
3. Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapat layanan Komprehensif.
4. Kota Layak Anak.
5. Indeks Reformasi Birokrasi (RB).

Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak :

- Meningkatnya Peran Perempuan dalam Pembangunan.
- Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak.
- Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan.
- Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak.
- Penyelenggaraan Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini kemudian dijabarkan ke dalam sasaran strategis jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sasaran merupakan hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, dan dialokasikan dalam 4 (empat) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeditbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
					2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Nilai AKIP	%	BB (75)	BB (75.10)	BB (75.20)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang akuntabel	Nilai AKIP	%	BB (75)	BB (75.10)	BB (75.20)
2	Terwujudnya Keadilan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	92.95	93.45	93.95
			Predikat Kota Layak Anak	%	Nindya	Nindya	Nindya
		Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	65.75	65.78	65.81
		Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	%	23.00	22.90	22.50

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeditbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Meningkatnya kualitas hidup dan tumbuh kembang anak	Predikat Kota Layak Anak	%	Nindya	Nindya	Nindya
Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani	%	0.029%	0.028%	0.027%

Sumber : Dokumen Rencana Strategi DPPPA Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Sebagaimana Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tabel 3.2.b dan isu-isu penting yang perlu diselesaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025, maka prioritas kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 antara lain :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah
3. Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan
4. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga dan Pembangunan Responsif Gender

3.3 Program dan Kegiatan

3.3.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Program dan kegiatan Rencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Selain untuk mendukung pencapaian program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, program dan kegiatan renja juga disusun untuk mendukung Sustainable Development Goal's (SDGs). Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitaslingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Adapun TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran dan 241 Indikator yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Berikut merupakan rincian 17 (tujuh belas) tujuan TPB/SDGs.

Gambar 3.3
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*
(TPB/SDGs)

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	



TPB/SDG's diadopsi secara nasional melalui Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) 2022 – 2026. Kemudian setiap daerah, termasuk Pemerintah Kota Bekasi, membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) 2022 – 2026 dan disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi kemudian melakukan diskusi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Bekasi untuk penetapan target setiap indikator dalam RAD TPB/SDG's 2022 - 2026.

Sesuai tugas dan fungsinya, pada penyusunan Dokumen RAD TPB/SDG's 2022 – 2026, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri berkontribusi dalam penetapan target indikator dalam Tujuan berikut:

Tujuan Ke-5 : Kesetaraan Gender - Menjamin Kesetaraan Gender Serta Memberdayakan Seluruh Perempuan. Pada tujuan ini, indikator yang berkaitan dengan program – program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Anak Kota Bekasi adalah yang berhubungan dengan kesetaraan gender, penghapusan diskriminasi, penghapusan kekerasan, pencegahan pernikahan usia dini, kesetaraan akses dalam bidang politik, ekonomi, dan teknologi.

Tujuan Ke-16 : Perdamaian, Keadilan Dan Kelembagaan Yang Tangguh - Mendorong Masyarakat yang Damai dan Inklusif untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan bagi Semua Orang termasuk Lembaga dan Bertanggungjawab untuk Seluruh Kalangan, serta Membangun Institusi yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Seluruh Tingkatan. Pada tujuan ini, indikator yang berkaitan dengan program – program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi adalah yang berhubungan dengan pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak di bawah umur, penanganan dan advokasi korban kekerasan, serta pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Selain Tujuan di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui berbagai program dan kegiatannya juga mendukung pencapaian Tujuan TPB/SDG's berikut :

Tujuan Ke-1 : Tanpa Kemiskinan - Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan dimanapun.

Tujuan Ke-6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak - Menjamin Ketersediaan dan Pengelolaan Air Bersih Serta Sanitasi yang Berkelanjutan bagi Semua Orang.

Tujuan Ke-10 : Berkurangnya Kesenjangan - Mengurangi Kesenjangan di Dalam dan di antar Daerah.

Tujuan Ke-11 : Kota dan Pemukiman Berkelanjutan - Menjadikan Kota dan Pemukiman Manusia Inklusif, Aman, Berketahanan dan Berkelanjutan.

3.3.2 Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

Penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

berpedoman pada RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026, dengan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Berikut ini merupakan rancangan akhir program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025, antara lain :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

<u>Paraf Koordinasi</u>	
<u>Kepala Bappeditbangda</u>	
<u>Kepala DPPPA</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>	

- Penyediaan Komponen Instalasi
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

<u>Paraf Koordinasi</u>	
<u>Kepala Bappeditbangda</u>	
<u>Kepala DPPPA</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>	

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

B. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

C. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan

<u>Paraf Koordinasi</u>	
<u>Kepala Bappeditbangda</u>	
<u>Kepala DPPPA</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>	

Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

D. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

E. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para pihak
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan pencegahan KTA.
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/Kota.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPPPA KOTA BEKASI

Rencana Kerja (Renja) dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang juga selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan dan subkegiatan yang disertai dengan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan, beserta rencana pendanaannya. Ketersediaan pendanaan ini digunakan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu dan memedomani klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta hasil pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yang terdiri atas program, kegiatan yang telah dilengkapi dengan kinerja, indikator kinerja serta satuan.

Berdasarkan Penetapan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan prioritas belanja daerah yang dibagi ke dalam prioritas pertama, prioritas kedua dan prioritas ketiga, sebagaimana perhitungan kapasitas riil keuangan daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Adapun klasifikasi prioritas belanja tersebut, sebagai berikut :

- a. Prioritas pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, dengan ketentuan :

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

- Belanja wajib merupakan belanja untuk menjamin kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo.
 - Belanja mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: belanja gaji dan tunjangan pegawai, belanja pembayaran tagihan telepon, air dan internet.
- b. Prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai pencapaian prioritas daerah, dengan mengacu pada rancangan RPD Tahun 2024-2026.
- c. Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai pencapaian prioritas Perangkat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi SKPD pemberi rekomendasi hibah kepada lembaga dan organisasi masyarakat, dimana rekomendasi hibah diberikan berdasarkan hasil telaah terhadap proposal pengajuan hibah lembaga dan organisasi terkait. Dana hibah yang telah disetujui dan disepakati tersebut menjadi bagian dari pagu indikatif Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025, dengan anggaran sebesar Rp 2.865.000.000,- (dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta rupiah). Hibah ini diberikan kepada Dharma Wanita Persatuan Kota Bekasi sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah), Tim Penggerak PKK Kota Bekasi sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan Komisi Perlindungan Anak Daerah

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeditbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Kota Bekasi sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah). Rencana pendanaan APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membiayai 5 program yang terdiri dari 4 program urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 1 (satu) program penunjang urusan pemerintah daerah. Total alokasi rencana pendanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebesar Rp 18.355.697.840,- (delapan belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiaah). Ringkasan rencana pendanaan APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Pendanaan APBD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2025

No	SKPD/SEKRETARIAT/ BIDANG	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Rencana Pendanaan (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat	1	7	19	9.539.970.600
2	Bidang Pengarusutamaan Gender dan Kualitas Keluarga	1	3	5	5.599.220.800
3	Bidang Pemenuhan Hak Anak	1	2	6	1.656.868.000
4	Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	2	6	6	2.388.175.400
TOTAL		5	18	36	19.184.234.800

Pendanaan rancangan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2025 tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi, dengan rinci rencana kerja Dinas

<u>Paraf Koordinasi</u>	
<u>Kepala Bappelitbangda</u>	
<u>Kepala DPPPA</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>	

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2025.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeditbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Tabel 4.2
RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI
TAHUN 2025

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		
								Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi
1	2					3	4	5	6	7
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			18.487.988.000	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			18.487.988.000	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			18.487.988.000	
1	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			9.539.970.600	
							<i>Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</i>	100%	6.947.576.000	
	2	08	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase capaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah</i>	100%	204.000.000	
	2	08	01	2	01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	6 Dokumen	200.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	01	2	01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	4.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	100%	6.743.576.000	

<u>Paraf Koordinasi</u>	
<u>Kepala Bappelitbangda</u>	
<u>Kepala DPPPA</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>	

	2	08	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	737 Orang/bulan	6.741.576.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	01	2	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	1 Laporan	2.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
								Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	85.000.000	
	2	08	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	100%	85.000.000	
	2	08	01	2	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	10 Orang	85.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
								Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	1.764.982.600	
	2	08	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	100%	728.000.600	
	2	08	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	3 Paket	25.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	253.000.600,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	3 Paket	125.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	01	2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	1 Laporan	15.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	12 Laporan	215.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	01	2	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	3 Dokumen	75.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	2	08	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.036.982.000	
	2	08	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lapo	12.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lapo	12.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
							Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	742.412.000	
	2	08	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	200.412.000	
	2	08	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	50.412.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	150.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	542.000.000	
	2	08	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	300.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	207.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	35.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	2	08	02				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	77,95%	5.599.220.800	
	2	08	02	2	01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (Pug) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota	77,95%	250.000.000	
	2	08	02	2	01	0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	765 Orang	250.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

	2	08	02	2	02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	487.000.000	
	2	08	02	2	02	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Organisasi	487.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
	2	08	02	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	100%		
	2	08	02	2	03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	4 Lembaga	3.385.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
	2	08	02	2	03	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	100 Orang	1.327.220.800,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
	2	08	02	2	03	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen	150.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
3	2	08	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	100%	803.275.400	
	2	08	03	2	01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah Tingkat Kab/Kota	100%	75.000.000	
	2	08	03	2	01	0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Perangkat Daerah	75.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
	2	08	03	2	02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	300.000.000	
	2	08	03	2	02	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50 Orang	300.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa
	2	08	03	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	428.275.400	

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeditbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

	2	08	03	2	03	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	428.275.400,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
4	2	08	06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan Hak anak dalam 5 Klaster	76%	1.656.868.000	
	2	08	06	2	01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100%		
	2	08	06	2	01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	290 Organi		
	2	08	06	2	02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	585.000.000	
	2	08	06	2	02	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2364 Orang	425.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	06	2	02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Dokumen	160.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
5	2	08	07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	100%	1.584.900.000	
	2	08	07	2	01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	254.400.000	
	2	08	07	2	01	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	2.850 Orang	254.400.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	2	08	07	2	02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelaksanaan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	815.500.000	
	2	08	07	2	02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	120 Orang	815.500.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappelitbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

	2	08	07	2	03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase capaian pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	100%	515.000.000	
	2	08	07	2	03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK</i>	1 Kegiatan	515.000.000,00	Kota Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	J U M L A H									18.487.988.000	

Paraf Koordinasi	
<u>Kepala Bappelitbangda</u>	
<u>Kepala DPPPA</u>	
<u>Kepala Bagian Hukum</u>	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rancangan Akhir Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 merupakan rancangan akhir perencanaan kerja untuk periode Tahun 2025, rancangan akhir renja yang akan diusulkan merupakan penjabaran dari tahun kedua Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026. Fungsi Rancangan Akhir Renja adalah sebagai usulan awal serta pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dokumen rancangan akhir ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Selain berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024-2026, Rancangan Akhir Renja ini juga disusun dengan berpedoman pada Rancangan RKPD Kota Bekasi Tahun 2025 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan. Selanjutnya Rancangan Akhir Renja akan melalui proses tahapan perencanaan anggaran hingga dapat disahkan dan dijabarkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) nantinya dimungkinkan terjadi perubahan dan atau penambahan berdasarkan isu strategis yang berkembang, masukan dari perangkat daerah/stakeholder/masyarakat dan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeditbangda	
Kepala DPPPA	
Kepala Bagian Hukum	

Dengan disusunnya Rancangan Akhir Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat mejadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus ukuran dari keberhasilan kinerja yang di laksanakan oleh Dinas PPPA Kota Bekasi.

Bekasi, Juni 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK

drh. SATIA SRIWIJAYANTI ANGGRAINI, M.M
NIP. 19710608 199803 2 003

